

## BAB IV

### KONSEP PERDAMAIAN PERSPEKTIF ABDURRAHMAN WAHID

Mengamati pemikiran Gus Dur memang menarik sekaligus menyulitkan. Menarik karena ide-idenya sangat sederhana, tetapi mampu memberikan wawasan tersendiri dalam menganalisis persoalan, baik di Indonesia maupun di dunia. Menyulitkan karena pemikirannya terkadang keluar dari kultur yang membesarkannya (NU dan Pesantren).<sup>120</sup>

#### A. Pengertian pendidikan Islam Perdamaian Perspektif Abdurrahman Wahid

Gus Dur mengemukakan pentingnya memahami arti penting Pendidikan Islam. Jika Islam di tafsirkan secara tidak benar maka Pendidikan Islam tampil sebagai ajakan menggunakan kekerasan atau terorisme dan tidak memperhatikan pandangan moderat. Padahal secara esensial konsep Pendidikan Islam membawa pesan persaudaraan untuk umat manusia.

Nabi Muhammad di utus untuk membawa amanat persaudaraan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan Al Qurannya ( *wa ma arsalnaka illarahmatan lil alamin*) hal ini di jelaskan di QS Al Anbiya 21: 107 .<sup>121</sup> Dengan kata rahmah di ambil dari pengertian rahim ibu dengan demikian manusia semuanya bersaudara. Sedangkan kata alamin berarti bukan manusia, berarti semua

---

<sup>120</sup> Ahmad, Munawar, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 55.

<sup>121</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, ( Bandung: CV Jumanatul Ali- Art, 2005 ), h. 331.

makhluk yang ada. Jadi tugas kenabian adalah membawa persaudaraan guna memelihara keutuhan manusia, jauh dari kekerasan. Bahkan menurut Gus dur kaum muslimin baru boleh menggunakan kekerasan jika aqidah mereka terancam atau di usir dari tempat tinggal.<sup>122</sup>

Menurut Gus Dur di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengusahakan terwujudnya peyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, untuk membina manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguba lagi agama, bangsa dan negara<sup>123</sup>

Pendidikan Islam mementingkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dengan mengutamakan kitab suci dari pada masalah bentuk negara. Kalau saja hal ini sepenuhnya disadari orang Islam tentu sumber keruwetan dalam hubunhan antar sesama umat muslim bisa di hindarkan. Jadi ketidak mampuan dalam memahami hal inilah yang menjadi sebab kemelut luar biasa dalam lingkungan gerakan Islam dewasa ini.<sup>124</sup> Bagi Gus Dur golongan formalis menggunakan Pendidikan Islam itu sebagai sistem, maksudnya adalah sistem Islami dan disini hanya memperoleh sedikit penganut. Sedangkan para ulama' Indonesia tidak setuju, mereka mengartikan bahwa Pendidikan Islam itu sebagai pengayom. Di mana Pendidikan Islam adalah pelindung bagi semua orang

---

<sup>122</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi Cetakan I*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 111.

<sup>123</sup> Ellyasa KH. Dharwis, *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil*, ( Yogyakarta: LKIS, 1997), h. 190.

<sup>124</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi Cetakan I*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 33.

walaupun non muslim. Hal ini telah di jelaskan pada ayat Al Quran Al-anbiya ( 21 ): 107.<sup>125</sup>

Untuk mewujudkan pendidikan Islam yang benar harus mengajarkan formalisasi Islam. Berpandangan Wahid yang perlu ditekankan disini adalah dua hal yang saling terkait dalam pendidikan Islam yaitu pembaharuan pendidikan Islam (*tajdid al-tarbiyah al-Islamiah*) dan modernisasi pendidikan Islam (*al-hadasah*). Pembaruan pendidikan Islam adalah ajaran formal Islam harus diutamakan dan kaum muslimin harus dididik mengenai ajaran agama mereka. Sedangkan yang di ubah adalah cara penyampaiannya kepada peserta didik, sehingga mereka akan mampu memahami dan mempertahankan kebenaran. Bahwa hal ini memiliki validitas sendiri, dapat dilihat pada kesungguhan anak-anak mudah terpelajar untuk menerapkan apa yang mereka anggap sebagai ajaran yang benar tentang pendidikan Islam.

Semangat menjalankan ajaran agama Pendidikan Islam datangnya lebih banyak dari komunikasi luar sekolah, antara berbagai komponen masyarakat Islam. Pendidikan Islam tidak hanya disampaikan dalam ajaran–ajaran formal Islam di sekolah agama namun melalui sekolah non agama di seluruh penjuru dunia. Sedangkan tantangan modernisasi adalah tantangan seperti pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup adalah respon yang tak kalah bermanfaat bagi pendidikan Islam, yang perlu kita renungkan secara mendalam.

---

<sup>125</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi Cetakan I* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 78.

Pendidikan Islam tentu saja harus sanggup meluruskan responsi terhadap tantangan modernisasi itu, namun kesadaran kepada hal itu justru belum ada dalam pendidikan Islam dimana-mana.<sup>126</sup>

Pendidikan Islam memiliki begitu banyak model pengajaran baik formal maupun non formal seperti kursus, pengajian, pondok pesantren<sup>127</sup> dan lain-lain. Keberagaman jenis dan corak pendidikan Islam terjadi seperti itu di tanah air kita ini. Ketidak mampuan memahami kenyataan ini, yaitu melihat lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah<sup>128</sup> di tanah air sebagai sebuah institusi pendidikan Islam, hanyalah akan mempersempit pandangan kita tentang pendidikan Islam itu sendiri. Ini berarti kita hanya mementingkan satu sisi belaka

---

<sup>126</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi Cetakan I*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006),h. 225.

<sup>127</sup> Pondok pesantren disebut juga sebagai lembaga pendidikan tertua yang telah berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah, dan pusat pengembangan masyarakat muslim di Indonesia. Kata pesantren atau santri berasal dari Bahasa Tamil yang berarti “guru mengaji”. Sumber lain menyebutkan bahwa kata itu berasal dari bahasa India *shastri* dari akar kata shastra yang berarti “buku-buku suci”, “buku-buku agama”, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan”. Di luar Jawa lembaga pendidikan ini disebut dengan nama lain, seperti surau (di Sumatera Barat), dayah (Aceh), dan pondok (daerah lain). Kekhususan pesantren dibanding dengan lembaga lembaga pendidikan lainnya adalah para santri atau murid tinggal bersama dengan Kyai atau guru mereka dalam suatu komplek tertentu yang mandiri.

<sup>128</sup> Kata ini bersal dari bahasa Arab yaitu berarti tempat belajar dari akar darasa. Istilah madrasah di tanah air seringkali di gunakan untuk penyebutan sekolah agama Islam, tempat proses belajar-mengajar ajaran Islam secara formal yang mempunyai kelas dengan sarana : meja, bangku dan papan tulis dan memiliki kurikulum klasik. Namun dalam perkembangan selanjutnya madrasah secara teknis memiliki arti konotasi yaitu suatu gedung atau bangunan tertentu yang lengkap dengan segala sarana dan fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar agama. Dalam pengertian yang lebih luas madrasah berarti aliran atau madzab yaitu sebutan untuk sekelompok ahli yang mempunyai pandangan atau paham yang sama dalam ilmu keIslaman, seperti di bidang fikih. Penulis barat menerjemahkan menjadi school atau aliran seperti Madrasah Maliki, Madrasah syafi’i, Madrasah Hanafi dan Madrasah Hanbali yang sinonim dengan Madzab Maliki, Madzab Syafi’i, Madzab Hanafi dan Madzab Hanbali.

dari Pendidikan Islam dan melupakan sisi non formal dari pendidikan Islam itu sendiri. Dan disinilah perjuangan pendidikan Islam.<sup>129</sup>

## **B. Tujuan Pendidikan Islam Perdamaian Perspektif Abdurrahman Wahid**

Sementara menurut Gus Dur dalam Konferensi Internasional Pertama tentang Pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977 merumuskan tujuan Pendidikan Islam sebagai berikut :

1. Pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelektual diri manusia yang rasional, perasaan dan indera. Oleh karena itu pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya seperti: spritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, baik secara individu maupun secara kolektif, dan mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan untuk mencapai kesempurnaan.
2. Tujuan akhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia.<sup>130</sup>

Konsep di atas sejalan dengan rumusan tujuan pendidikan Islam, yaitu meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman anak

---

<sup>129</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi Cetakan I*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006),h. 226.

<sup>130</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka 1995, edisi ke-2, Cet ke-4), h. 1077.

tentang Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam konteks ini pendidikan Islam haruslah senantiasa mengorientasikan diri kepada menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai konsekuensi logis dari perubahan.

Dapat pula dikatakan, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah kepribadian muslim, yaitu sesuatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam. Orang yang dalam kepribadian muslim dalam Al-qur'an disebut "Muttaqin" karena itu Pendidikan Islam berarti pula pembentukan manusia yang bertakwa, sebagaimana konsep pendidikan nasional yang dituangkan dalam tujuan pendidikan nasional yang akan membentuk manusia pancasilais yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian jika dilakukan rekonstruksi, maka menurut Islam ilmu yang selayaknya dikuasai manusia merupakan perpaduan dari ilmu – ilmu yang diperoleh manusia melalui kawasan alam semesta dengan ilmu yang dikirim melalui wahyu yang dapat ditangkap oleh para nabi dan rasul. Dalam perspektif pendidikan Islam yang menyiapkan manusia agar dapat melakukan perannya, baik sebagai *khalifah* maupun sebagai *'abd*, maka ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu yang sifatnya terpadu, dan inilah ciri khas pendidikan Islam.

Dilihat dari tujuan pendidikan di atas maka dengan sendirinya terimplisit fungsi pendidikan Islam. Dapat diartikan fungsi Pendidikan Islam adalah untuk

menjaga keutuhan unsur–unsur individu anak didik dengan mengoptimalkan potensinya dalam garis keridhaan Allah, serta mengoptimalkan perkembangannya untuk bertahan hidup terhadap aspek keterampilan setiap anak.

Pendidikan Islam adalah pendidikan terbuka. “Artinya Islam mengakui adanya perbedaan, akan tetapi perbedaannya yang hakiki ditentukan oleh amalnya. Oleh karena itu pendidikan Islam pada dasarnya terbuka, demokratis, dan universal. Keterbukaan tersebut ditandai dengan kelenturan untuk mengadopsi (menyerap) unsur–unsur positif dari luar, sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya, dan tetap menjaga dasar–dasarnya yang original yang bersumber pada Al-Qur’an dan Al-hadits.<sup>131</sup>

### **C. Pendidikan Perdamaian dalam Konteks ke- Indonesiaan dalam Perspektif Abdurrahman Wahid**

Wajah budaya Indonesia yang bhineka menuntut sikap toleran yang tinggi dari setiap anggota masyarakat. Sikap toleransi tersebut harus dapat diwujudkan oleh semua anggota dan lapisan masyarakat sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang kompak tapi beragam sehingga kaya akan ide-ide baru.<sup>132</sup> Serta hubungan antar agama di Indonesia selama kurun waktu 30 tahun terakhir ini telah berkembang dalam berbagai dimensinya yang ada.

---

<sup>131</sup> Abd al- Ghani ‘Abud, *Dirasat Muqaranat li Tarikh al – Tarbiyah*, (Kairo : Dar al- Fikr Al – Arabi, 1987 ),h. , 203.

<sup>132</sup> Maman Imanulhaq Faqih, *Fatwa dan Canda Gus Dur*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 139.

Toleransi yang diajarkan dan dipraktekkan Gus Dur tidak sekedar menghormati dan menghargai keyakinan atau pendirian orang lain dari agama yang berbeda, tetapi juga disertai kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran yang baik dari agama lain, dalam sebuah tulisannya yang berjudul *Intelektual di Tengah Eksklusivisme*, Wahid pernah mengatakan:

“ Saya membaca, menguasai, menerapkan al-Qur’an, al-Hadis, dan kitab-kitab Kuning tidak dikhususkan bagi orang Islam. Saya bersedia memakai yang mana pun asal benar dan cocok dan sesuai hati nurani. Saya tidak mempedulikan apakah kutipan dari Injil, Bhagawad Gita, kalau bernas kita terima. Dalam masalah bangsa, ayat al-Qur’an kita pakai secara fungsional, bukannya untuk diyakini secara teologis. Keyakinan teologis dipakai dalam persoalan mendasar. Tetapi aplikasi adalah soal penafsiran. Berbicara masalah penafsiran berarti bukan lagi masalah teologis, melainkan sudah menjadi masalah pemikiran.”<sup>133</sup>

Dalam pidato perayaan Natal pada tanggal 27 Desember 1999 di Balai Sidang Senayan Jakarta, misalnya, Wahid menyampaikan :

“ Saya adalah seorang yang menyakini kebenaran agama saya, tapi ini tidak menghalangi saya untuk merasa bersaudara dengan orang yang beragama lain di negeri ini, bahkan dengan sesama umat beragama. Sejak kecil itu saya rasakan. Walaupun saya tinggal di lingkungan pasantren, hidup dikalangan keluarga kiai, tak pernah sedikitpun saya merasa berbeda dengan yang lain.”<sup>134</sup>

Perbedaan keyakinan tidak membatasi atau melarang kerjasama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia. Penerimaan Islam akan kerjasama itu tentunya akan dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan, apabila ada dialog antaragama.

---

<sup>133</sup> Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), cet. II, h. 204.

<sup>134</sup> Rumadi, “Dinamika Agama dalam Pemerintahan Gus Dur”, dalam Khamami Zada (ed) *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*, (Jakarta: LAKPESDAM),h. 144.

Dengan kata lain prinsip pemenuhan kebutuhan berlaku dalam hal ini, seperti adagium *ushul fiqh*/ teori legal hukum Islam: ”sesuatu yang membuat sebuah kewajiban agama tidak terwujud tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula (*Ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajibun*)”. Kerjasama tidak akan terlaksana tanpa dialog, oleh karena itu dialog antaragama juga menjadi kewajiban.<sup>135</sup>

Tentang pluralitas, seperti terdapat dalam QS. al-Hujurat: 13, menurut Wahid, ayat tersebut menunjuk kepada perbedaan yang senantiasa ada antara laki-laki dan perempuan serta antar berbagai bangsa atau suku bangsa. Dengan demikian, perbedaan merupakan sebuah hal yang diakui Islam, sedangkan yang dilarang adalah perpecahan dan keterpisahan.

Tentu saja adanya berbagai keyakinan itu tidak perlu dipersamakan secara total, karena masing-masing memiliki kepercayaan atau aqidah yang dianggap benar. Demikian pula kedudukan penafsiran-penafsiran aqidah itu. Umat Katholik sendiri memegang prinsip itu. Seperti dalam Konsili Vatikan II yang dipimpin Paus Yohannes XXIII dari tahun 1962-1965,<sup>136</sup> menyebutkan bahwa para Uskup yang menjadi peserta menghormati setiap upaya mencapai kebenaran, walaupun tetap yakin bahwa kebenaran abadi hanya ada dalam ajaran

---

<sup>135</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2002),h. 133-134.

<sup>136</sup> Konsili Vatikan II adalah sebuah pertemuan (konsili) besar para Kardinal (pemimpin tertinggi gereja Katolik di suatu negara)) se-dunia untuk membahas persoalan-persolan penting dalam gereja Katolik atas undangan Sri Paus Yohanes Paulus XXIII di kota Vatikan 1962-1965. Kompilasi lengkap pembicaraan dan keputusan Konsili Vatikan II telah diterbitkan oleh Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI (Konferensi Wali Gereja) Pusat tahun 1993 (edisi revisi). Ungkapan yang paling terkenal dari Konsili Vatikan II adalah keselamatan tidak hanya ada di Gereja Katolik Roma, dan implikasinya harus memberikan penghormatan kepada kepercayaan dan agama lain. Dan statemen ini merupakan pembaharuan dari cara pandang gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan II yang memandang keselamatan hanya ada pada Gereja Katolik Roma..

agama mereka. jadi keyakinan masing-masing tidak perlu diperbandingkan atau dipertentangkan.<sup>137</sup>

Disinilah nantinya terbentuk persamaan antar agama, bukannya dalam ajaran atau aqidah yang dianut, namun hanya pada tingkat capaian materi. Karena ukuran capaian materi menggunakan bukti-bukti kuantitatif seperti tingkat penghasilan rata-rata masyarakat. Yang bisa di aplikasikan dalam pembelajaran agar saling toleransi dan menghormati antar umat beragama sehingga terwujudnya perdamaian.

Melalui Pendidikan Islam Perdamaian seorang murid bisa diantarkan untuk dapat memandang pluralitas, Multikultural dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, sosial, dan agama sebagai kekayaan spiritual bangsa yang harus dijaga kelestariannya. Ainurrofiq Dawam memberikan kerangka orientasi Pendidikan Pluralisme atau Pendidikan Multikultural agar pendidikan tersebut tidak kehilangan arah dan dibangun berdasarkan orientasi nilai dasar multikulturalisme guna terwujudnya Pendidikan Islam Perdamaian, yaitu:<sup>138</sup>

#### 1. Orientasi Kemanusiaan

Kemanusiaan atau humanisme merupakan sebuah nilai kodrati yang menjadi landasan sekaligus tujuan pendidikan. Kemanusiaan bersifat universal, global, di atas semua suku, aliran, ras, golongan, dan agama.

---

<sup>137</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2002), h. 135.

<sup>138</sup> Dawam, Ainurrofiq, *Emoh Sekolah; Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual, Menuju Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Inspeal Ahimsa Karya Press, 2003), h. 104-105.

2. Orientasi kebersamaan.

Kebersamaan yang dibangun adalah kebersamaan yang sama sekali lepas dari unsur kolusif maupun koruptif. Kebersamaan yang dibangun adalah kebersamaan yang tidak merugikan diri sendiri, orang lain, lingkungan, negara, bahkan Tuhannya. Dengan demikian diharapkan muncul manusia yang aktif, kreatif, toleran, tenggang rasa yang mendalam, dan terbuka.

3. Orientasi kesejahteraan.

Kesejahteraan yang dimaksud di sini adalah kondisi sosial yang menjadi harapan semua orang. Konsistensi terhadap kesejahteraan harus dibuktikan dengan perilaku menuju terciptanya kesejahteraan. Konsekuensi yang kemudian terjadi adalah adanya kedamaian di mana semua orang merasa aman, dihargai, diakui, dan diperlakukan sebagai manusia oleh semua pihak yang berinteraksi secara langsung atau tidak langsung.

4. Orientasi proporsional.

Proporsional merupakan sebuah nilai yang dipandang dari aspek apapun adalah sangat tepat. Tepat landasan, tepat proses, tepat pelaku, tepat ruang, tepat waktu, tepat anggaran, tepat kualitatif, tepat kuantitatif, dan tepat tujuan. Orientasi pendidikan inilah yang diharapkan menjadi pilar pendidikan multikultural, pluralisme dan perdamaian.

5. Orientasi mengakui pluralitas dan heterogenitas.

Pluralitas dan heterogenitas merupakan sebuah kenyataan yang tidak mungkin ditindas secara fasih dengan memunculkan sikap fanatisme terhadap sebuah kebenaran yang diyakini oleh sekelompok orang.

6. Orientasi anti hegemoni dan anti dominasi.

Dominasi dan hegemoni adalah dua istilah yang sangat populer bagi kaum tertindas. Istilah ini dihindari jauh-jauh oleh para pengikut paham liberalis, kapitalis, globalis, dan neoliberalis. Hegemoni yang dimaksud adalah hegemoni dalam segalanya; politik, pelayanan dan lain sebagainya.<sup>139</sup>

#### **D. Aktualisasi Pemikiran Abdurrahman Wahid Mengenai Pendidikan Perdamaian**

Kepedulian Gus Dur terhadap kasus-kasus internasional yang beberapa diantaranya kontroversial termasuk hubungannya dengan Israel, maupun kasus kekerasan etnik dan keagamaan serta kasus yang berkaitan dengan HAM dan demokrasi<sup>140</sup> di Indonesia, misalnya: persoalan Ahmadiyah, Bom Bali, Konflik

---

<sup>139</sup> Dawam, Ainurrofiq, *Emoh Sekolah; Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual, Menuju Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Inspeal Ahimsa Karya Press, 2003), 104-105.

<sup>140</sup> Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dengan kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara, di mana kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus bertujuan untuk rakyat. Konsep ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika kekuasaan pemerintah yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Sampit, Tragedi berdarah di Ambon, Tragedi semanggi, kasus *Monitor*, ICMI, Ulil Abshar Abdalla, Inul, peristiwa Banyuwangi dan pembunuhan di Jawa Timur tahun 1998, Sambas di Kalimantan Barat, peristiwa Ambon di Maluku, GAM di Aceh, masalah Timor Timur, persoalan Etnis China, tidak hanya dibuktikan pada level pemikiran belakan, namun Gus Dur selalu tampil sebagai pembela pada level praktis dan lain sebagainya. Berikut beberapa kepedulian Gus Dur terhadap kasus-kasus internasional yang kontroversial yaitu:

1. Jama'ah Ahmadiyah

Ketika banyak kelompok menghujat dan berusaha menyingkirkan kelompok lain yang dianggap sesat dengan cara-cara kekerasan dan penistaan seperti yang sering dialami jamaah Ahmadiyah, Wahid selalu tampil sebagai pembelanya. Bukan berarti Wahid setuju dengan keyakinan Ahmadiyah itu, tetapi Ia sangat menghormati keyakinan seseorang.

2. Kasus *Monitor*

Kasus *Monitor* pada bulan Oktober 1990, di mana tabloid tersebut dirusak massa yang mengatasnamakan Islam gara-gara sebuah surveinya yang menyinggung perasaan umat Islam. Menurut Gus Dur, kasus monitor menunjukkan bahwa kelompok dalam masyarakat ingin memanipulasi isu-isu agama untuk mengedepankan kepentingan mereka. Sehingga beliau mendirikan Forum Demokrasi untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia.

### 3. Munculnya ICMI<sup>141</sup>

Berdirinya ICMI pada Desember 1990. Menurut Gus Dur, ICMI merupakan alat eksploitasi politik terhadap agama yang mengutamakan kepentingan kelompok eksklusif yang sempit di atas kepentingan nasional. ICMI akan mengaliansikan non-Muslim dan memperburuk pembelahan dan salah paham yang sudah kuat dalam masyarakat Indonesia selama ini antara kelompok keagamaan, kesukuan dan budaya yang berbeda. Peristiwa ini pula yang melatarbelakangi Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi.

### 4. Pembelaan terhadap Ulil Abshar Abdalla, Inul Daratista, dan kelompok yang dituduh Komunis.

Ia tanpa ragu membela Ulil Abshar Abdalla, seorang intelektual muda NU yang juga tokoh muda “Islam Liberal” yang mengemukakan Liberalisme Islam, sebuah pandangan yang sama sekali baru dan memiliki sejumlah implikasi yang sangat jauh, misalnya anggapan bahwa Ulil akan mempertahankan kemerdekaan berpikir seorang santri demikian bebasnya, sehingga meruntuhkan asas-asas keyakinannya sendiri akan kebenaran Islam. Itulah sebabnya mengapa demikian besar reaksi orang terhadap pemikirannya ini. Seperti diketahui bahwa sejumlah ulama’ serta aktifis

---

<sup>141</sup> Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 Desember 1990, pada sebuah simposium yang menghimpun sekitar lima ratus cendekiawan muslim Indonesia bertema “Membangun Masyarakat Indonesia Abad XXI” di Malang Jawa Timur. Ketua Umum ICMI untuk pertama kalinya (1991-1995) adalah Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie.

Islam tertentu menilai pemikiran Ulil telah sesat dan keluar dari Islam, dan karena itu Ia layak dihukum mati.

Menurut Gus Dur, kemerdekaan berpikir adalah sebuah keniscayaan dalam Islam. Demikian juga dalam kasus Inul Daratista, perempuan lugu dan sederhana ini dicerna keras oleh sebagian Tokoh Agama, Majelis Ulama', dan Seniman karena goyang ngebornya dianggap melanggar batas-batas kesusilaan umum. Mereka menggunakan justifikasi fatwa-fatwa keagamaan untuk melarang Inul tampil di depan publik. Di tengah kontroversi itu, Gus Dur tampil melindungi dari gempuran kecaman dan panasnya opini publik yang menekan Inul. Pembelaan Gus Dur didasarkan pada melindungi Hak Asasi *wong cilik* dari hegemoni elit keagamaan dan klaim atas moralitas kesenian yang agak represif.

Dalam pembelaannya terhadap mereka yang diperlakukan tidak manusiawi karena dituduh sebagai anggota kelompok Komunis. Karena itu, ketika Ia menjadi Presiden, Gus Dur mengusulkan pencabutan TAP No. XXV/MPRS/1966 soal pelarangan penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Namun usul tersebut akhirnya ditolak. Dalam rapat yang berlangsung hari Senin 29 Mei 2000, seluruh fraksi MPR yang ada di panitia Ad Hoc II badan pekerja (PAH II BP) MPR menolak usul Gus Dur tersebut. Para anggota MPR tampaknya masih sulit membedakan antara

Komunisme sebagai ideologi (pengetahuan) dan Komunisme sebagai gerakan partai (G 30S PKI).<sup>142</sup>

5. Peristiwa Banyuwangi dan Pembunuhan di Jawa Timur Tahun 1998

Pembunuhan yang konon dilakukan oleh para Ninja berpakaian serba hitam itu telah memakan korban 200 orang lebih, terbukti bahwa orang yang terlibat dalam pembunuhan ini mempunyai pendidikan militer dan terorganisir dengan baik. serta menginginkan kerusuhan sosial di masyarakat. Perlu dicatat bahwa sebagian korban peristiwa itu adalah anggota NU yang memiliki kedudukan sebagai Ulama' di daerah mereka. Respon Gus Dur terhadap pembunuhan tersebut adalah dengan mengunjungi Banyuwangi dan mendorong para tokoh agama lokal untuk menahan diri dari godaan untuk merespons kekerasan ini dengan kekerasan.

6. Sambas di Kalimantan Barat

Daerah ini mempunyai sejarah konflik yang panjang, khususnya antara transmigran Madura dengan penduduk lokal Dayak dan masyarakat Melayu. secara kebetulan penduduk asal Madura mempunyai hubungan dengan NU. mempelajari akar konflik itu, sering dikatakan bahwa elemen-elemen kekerasan etnik dan agama berakar pada kenyataan bahwa dalam konflik itu masyarakat Dayak yang Kristen bekerja sama dengan masyarakat Melayu yang Muslim dan karenanya kerusuhan itu berkaitan dengan faktor sosio-ekonomi.

---

<sup>142</sup> Dhakiri, M. Hanif, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 72.

Meski selama hari-hari sibuk pra-kampanye, Wahid menyempatkan diri untuk mengunjungi langsung daerah sengketa tersebut untuk bertemu dengan para pemimpin lokal dan meminta respons mereka dengan sabar dan dewasa terhadap persoalan yang sangat kompleks ini. serta kunjungan meredakan konflik tersebut terus berlanjut pada kesempatan berikutnya. saat itu beliau ditemani oleh Alwi Shihab untuk bertemu dengan kelompok yang terdiri atas ratusan pemimpin lokal, mengadakan makan siang bersama dan membicarakan isu kekerasan dan peranan agama dan etnisitas. Baik Alwi maupun Wahid berbicara dengan baik, sabar dan penuh keyakinan serta agaknya punya pengaruh besar terhadap para pendengarnya.

Sulit untuk menentukan sampai mana kunjungan singkat tersebut bersifat instrumental dalam pencapaian perubahan yang cepat, tetapi yang jelas Gus Dur konsisten dengan posisinya, memberikan prioritas untuk mendorong pemimpin agama lokal dan pemimpin masyarakat untuk menghindari kekerasan.

#### 7. Peristiwa Ambon di Maluku

Di Ambon, tak lama setelah pecah kekerasan dan kondisinya saat itu benar-benar tegang sehingga tidak mungkin mengadakan pertemuan dengan kubu pemimpin Muslim maupun Kristen seperti yang direncanakan. meski demikian, Gus Dur tetap bertemu dengan para pemimpin masyarakat lokal dan membujuk mereka agar bersabar dan toleran dan menahan kekerasan. sulit sekali untuk mengukur arti kunjungan Gus Dur tersebut yang teramat

penting, Wahid merasa perlu untuk mengunjungi dan mempertaruhkan reputasi persoalannya untuk mencari jalan pemecahan.

#### 8. GAM di Aceh

Kunjungan Gus Dur ke Aceh pada bulan Mei 1999 adalah atas undangan mahasiswa Aceh untuk berbicara masalah-masalah yang dihadapi Aceh, khususnya berkaitan dengan kekerasan yang sedang dan terus berlangsung di Aceh di tangan militer/TNI dan semakin kuatnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).<sup>143</sup> di sana Ia juga mengunjungi para pemimpin komunitas agama walaupun banyak diantaranya bukan anggota PKB, karna saat itu adalah saat menjelang kampanye. Meski sibuk menyiapkan kampanye, Gus Dur tetap menyempatkan untuk meredakan konflik Aceh padahal Ia juga tahu bahwa Aceh bukanlah basis PKB. ini menunjukkan kunjungan tersebut memang murni dorongan hati nurani beliau.

#### 9. Masalah Timor Timur

Dalam seluruh aktivitas untuk menyelesaikan kekerasan ini, pelanggaran HAM dan konflik yang sedang berlangsung, satu persoalan

---

<sup>143</sup> Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatistis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam. Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatra Utara di sebelah tenggara dan selatan. Ilepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara kedua pihak yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama *Aceh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang menjadi warga negara dan bermukim di Swedia. Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah Indonesia memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.

penting muncul di hadapan Gus Dur dan dituntut untuk segera disikapi untuk merespons pasukan internasional penjaga perdamaian di Timor Timur. pada bulan September 1999, Gus Dur membuat serangkaian komentar keras, khususnya diarahkan pada pemerintahan Australia dan juga lembaga-lembaga lain yang dianggap mencampuri urusan internal Indonesia.

#### 10. Persoalan Etnis China.

Wahid sengaja melakukan hubungan dengan Beijing dan orang-orang China, baik di daratan China maupun seluruh Asia Tenggara. Di samping untuk membantu orang-orang China di Indonesia sebagai WNI, juga menjadi pemikiran penting sebagai pendewasaan masyarakat Indonesia. karena itu dia nyatakan tujuan akhirnya adalah dihapuskannya diskriminasi atas orang-orang China Indonesia. bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan pun, berkaitan dengan resiko politik, dia telah menunjukkan dukungannya bagi orang-orang China, Kristen, dan masyarakat minoritas lainnya. Pada tanggal 10 Maret 2004, beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, yang selama ini dikenal sebagai kawasan *pecinan* di Semarang Jawa Tengah, mentahbiskan Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa. Wahid bukan hanya banyak melahirkan pemikiran dan kebijakan yang menghormati masyarakat Tionghoa, tetapi juga mensejajarkan mereka dengan semua kelompok yang ada di bumi Nusantara dari berbagai agama, suku dan adat-istiadat yang berbeda. Pada level praktis dan kebijakan, pembelaan Gus Dur terhadap kelompok dan etnis Tionghoa dibuktikan

secara nyata. Saat Ia menjadi Presiden, hari raya Imlek bisa diperingati dan dirayakan dengan bebas. Warga Tionghoa tidak perlu lagi harus sembunyi-sembunyi jika merayakannya.

Kebebasan ini tak lepas dari keputusan politik Gus Dur yang pada 17 Januari 2000 mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2000, isinya mencabut Inpres nomor 14/1967 yang dibuat Soeharto tentang agama, kepercayaan, dan adat-istiadat China. Dengan Inpres No 14/1967 rezim Orde Baru yang represif telah membuat Imlek terlarang dirayakan di depan publik, Barongsai, Liang Liong harus sembunyi, huruf-huruf atau lagu Mandarin tidak boleh diputar di radio.<sup>144</sup>

#### 11. Bom Bali

Tiga buah bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan di Denpasar, Bali pada 12 Oktober 2002. Lebih dari 180 orang menjadi korban, termasuk sangat banyak orang yang mati seketika.<sup>145</sup> Para teroris semakin lama semakin merajalela, dan mendorong masyarakat untuk menganggapnya sebagai buatan luar negeri yang tidak dapat diatasi. Akhirnya, terorisme mengalami eskalasi luar biasa, dan terjadilah peledakan 3 buah bom

---

<sup>144</sup> Dhakiri, M. Hanif, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 71

<sup>145</sup> Seringnya terjadi peristiwa terorisme dan kekerasan lainnya tidak dipungkiri telah mengakibatkan banyak korban berjatuhan yang pada akhirnya telah menggiring kepada identifikasi minor bahwa potret Islam fundamentalis lebih menjadi objek kajian yang menarik karena sebagai pihak tertuduh dalam beberapa kasus terorisme ketimbang potret Islam substansialis di negeri kita ini. Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi Cetakan I*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 292.

berkekuatan sangat tinggi di Bali. Korban yang berjatuhan sangat besar, berjumlah di atas 200 jiwa, ini menurut laporan media massa sendiri.

Pemerintah sendiri tidak siap menghadapinya, terbukti dari usulan-usulan yang saling bertentangan antar pejabat pemerintahan di tingkat pusat. Ada usul agar supaya kegiatan-kegiatan intelejen dikoordinir oleh sebuah badan baru, sedangkan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menganggap hal itu tidak perlu. Menhan Matori Abdul Djamil menganggap ada gerakan Islam internasional di belakang peristiwa pengeboman itu, sedangkan Kapolri sendiri menyatakan belum ada bukti-bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kalau di lingkungan pemerintahan saja terjadi perbedaan pendapat.<sup>146</sup>

## 12. Konflik Filipina

Seiring dengan berjalannya waktu, Gus Dur telah tumbuh berkembang reputasinya bukan hanya sebagai pemimpin agama yang memiliki komitmen terhadap nilai toleransi, tetapi juga seorang pemikir yang independen dan bijaksana, pada kunjungan ke Jakarta pada September 1993, Presiden Filipina, Fidel Ramos mencuri kesempatan untuk berkonsultasi dengan Wahid berkaitan dengan masalah perselisihan Muslim Moro di bagian selatan Pulau Mindanao agar dapat diselesaikan tanpa konflik senjata, Gus Dur sepakat dengan menambahkan bahwa: “semakin lama masyarakat Islam dibiasakan dengan konflik bersenjata, semakin lama

---

<sup>146</sup> *Ibid*, 295.

pula mereka diharuskan berjuang mengatasi kemundurannya”, Ramos kemudian mengundang Wahid untuk mengunjungi Filipina dan membantu berunding dengan Front Pembebasan Moro.

Permintaan yang diresponnya pada tahun berikutnya. lebih menarik lagi itu dua pekan sebelum kunjungan Ramos ke Jakarta, Wahid dianugerahi salah satu hadiah paling bergengsi di Filipina dan Asia Tenggara, yaitu Magsaysay Award (sebagai keterlibatan Wahid yang luas dalam upaya untuk mengembangkan toleransi beragama).

### 13. Hubungan Diplomatik dengan Israel

Dalam hal ini dukungan Gus Dur untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. sangatlah penting untuk menimbang konteks historis posisi kebijakan, Gus Dur khususnya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Israel. Gus Dur sendiri telah memberikan berbagai macam alasan bahwa hubungan tersebut berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan perwujudan kemauan baik pada Israel itu sendiri. Jika Indonesia dapat membuka hubungan dengan Israel, maka Indonesia akan memiliki posisi yang sangat kuat untuk memperkuat argumentasi bagi perbaikan sosial dan politik di Timur Tengah, khususnya Israel dengan Palestina. dalam konteks ini, Gus Dur mengatakan bahwa sebagai Muslim terbesar di dunia, sangatlah tepat jika Indonesia memainkan peranan penting bagi perdamaian Israel dan Palestina. sudah pasti normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sangat terikat dengan suksesnya perdamaian itu.

Inilah yang mendasari Gus Dur ketika pertama kali mengunjungi Israel pada bulan oktober 1994 untuk menjadi saksi kemajuan proses perdamaian antara Israel dengan negara-negara “Arab”. Gus Dur berempat, ditemani oleh tokoh utama dialog antaragama.<sup>147</sup>

#### 14. Konflik Sampit

Sampit Kalimantan Tengah yang meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangka Raya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura.

---

<sup>147</sup> Dhakiri, M. Hanif, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 71.